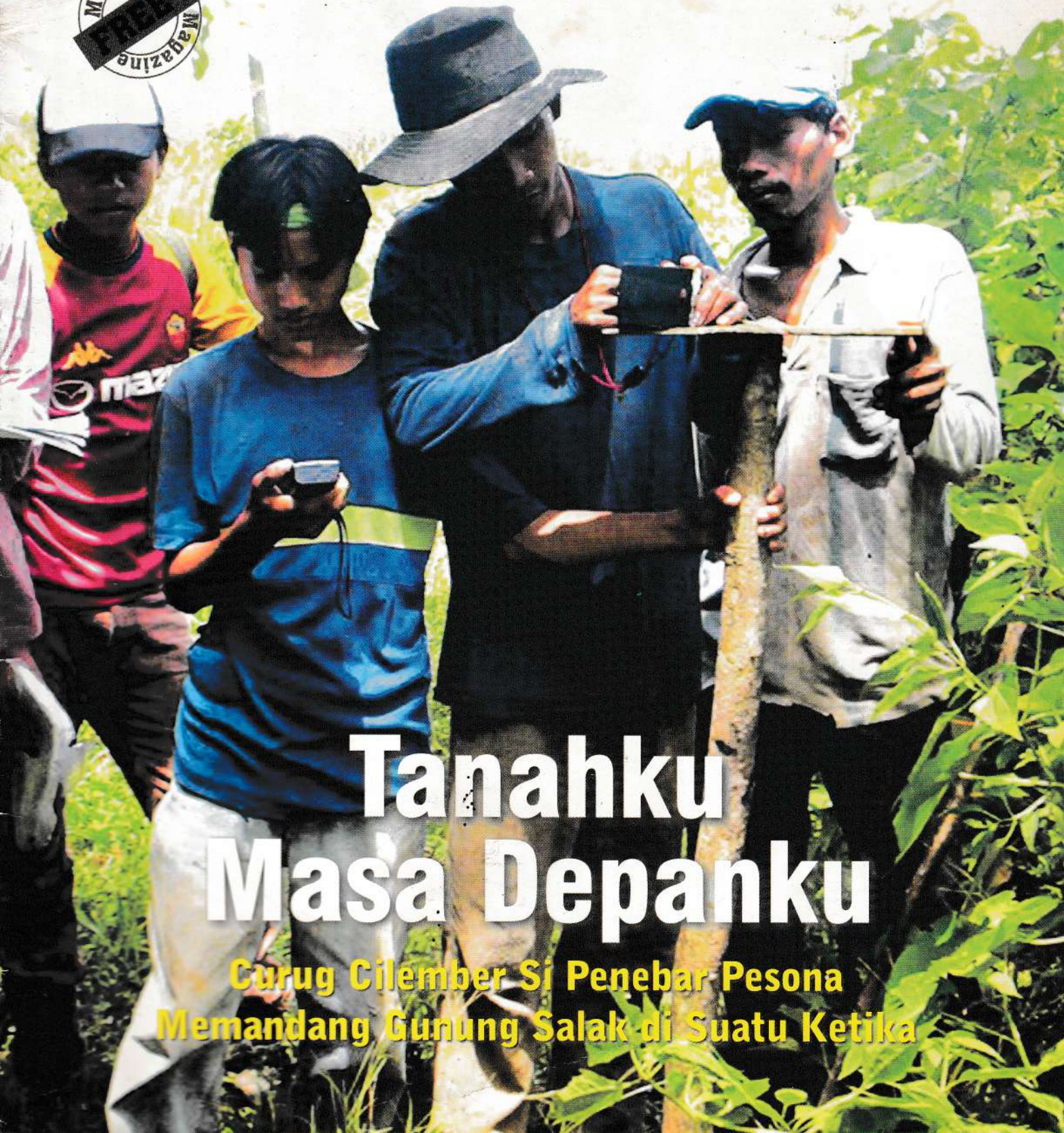
ISSN 1907-8137

Edisi 3/Vol. I November 2006

FOREST CULTURE

conservation • education • life style

Monthly Magazine FREE!



Tanahku Masa Depanku

Curug Cilember Si Penebar Pesona

Memandang Gunung Salak di Suatu Ketika



Sampul Depan : Masyarakat Bengkunat - Krui, Lampung Barat sedang melakukan pemetaan / Foto : Kurniadi
Sampul Belakang : Siluet Senja / Foto : Rudy Novira

EDISI 3

4 ENTRANCE
4 YOUR LETTER
5 INSIGHT
6 COVER STORY
Bumbu Tak Sedap Kehutanan Indonesia Memanen Harapan Kosong Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat Lapangan Sempur : Ruang Publik Kota Hujan
14 TRAVELOGUE
Curug Cilember Si Penebar Pesona
16 OVERSEAS
Perencanaan Hutan Komunitas Oleh Masyarakat Creston
18 COMMUNITY
19 RELATION
20 FOREST INSIDE
Wilayah Jelajah Margasatwa
22 PHOTO ESSAY
Memandang Gunung Salak di Suatu Ketika
24 INSPIRATION
25 DOCUMENTARY COLLECTION
Gliricidia : .....seed of change
26 NEWS BLITZ
26 AGENDA

FOREST CULTURE

Adalah majalah independen mengenai hutan, lingkungan, serta masyarakat.
Diterbitkan oleh LATIN - Lembaga Alam Tropika Indonesia.
Sebuah lembaga independen non pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari

Arif Aliadi **(Chief Editor)** Rosita Dewi **(Managing Editor)**
I.G.G. Maha Adi, Heru Pamuji, Lis Hendriani **(Senior Editor)**
Sri Nuryani **(Research and Distribution)**
Nana Rusyana **(Art and Design)**
Rudy Novira **(Marketing and Photo Editor)**
Pagitta Tarigan, Wibowo A D, Budi Rahardjo, Suporahardjo, Misja Bonke **(Contributor)**
Asep Umar Jaya, Veny Iswati **(Finance)**

Alamat Redaksi, Marketing, dan Sirkulasi :
LATIN , Jl. Sutera No. 1 Desa Situgede
Kec. Bogor Barat 16680. Bogor - Indonesia
Telp : 0251 420522-23 Fax. 0251 626593
Email Redaksi : forestculture@latin.or.id
Marketing/Iklan : marketing_fc@latin.or.id
Sirkulasi : sirkulasi_fc@latin.or.id
Website. http://www.latin.or.id/forestculture

Senja Memerah / Foto : Rudy Novira.

Tarik-Menarik Kepentingan

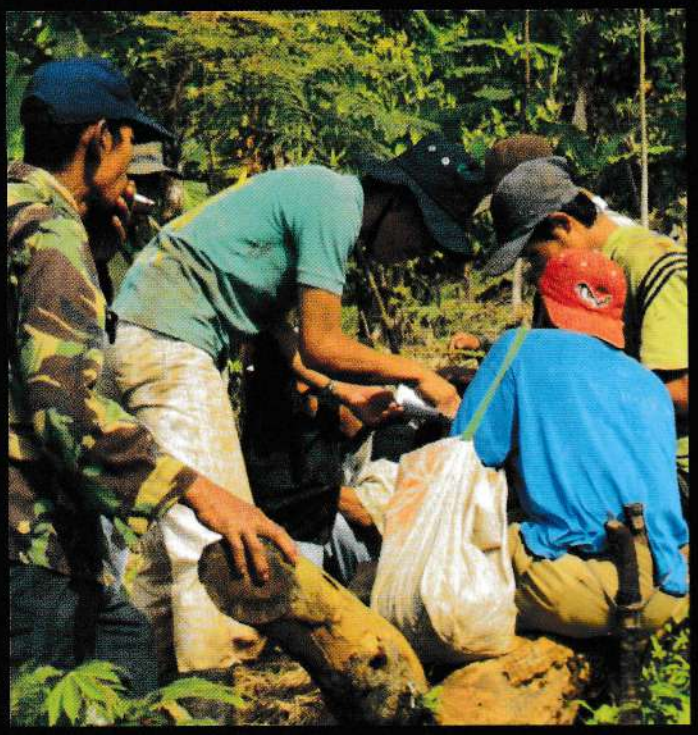
Pembaca Yth.

Sumberdaya alam seperti hutan, laut, maupun air merupakan sumber utama kelangsungan hidup masyarakat secara umum. Apabila dilihat lebih khusus lagi, maka masyarakat umum terdiri atas berbagai kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan berbeda terhadap sumberdaya alam.

Banyaknya kepentingan telah mendorong suatu situasi dimana masing-masing pihak ingin memanfaatkan, mengelola dan mengontrol sumberdaya alam tersebut.

Ada kelompok masyarakat yang sudah mengelola sumberdaya hutan selama puluhan tahun kemudian berbenturan dengan pengusaha yang ingin melakukan eksploitasi hutan. Ini bisa terjadi ketika pengusaha telah mengantongi ijin dari pemerintah yang punya kepentingan yang sejalan dengan kepentingan pengusaha.

Dalam edisi FC kali ini, kami mencoba menggambarkan secara singkat lika-liku pengelolaan lahan di Kabupaten Dompu (NTB), Pandeglang (Banten), dan Bogor berkaitan dengan tarik-menarik kepentingan tersebut.



yourletter

Ditunggu FC edisi berikutnya

Kami mengucapkan terima kasih atas dimuatnya artikel mengenai "Poelang Kampoeng Ala Cinangneng" dalam Forest Culture Edisi 1. Juga kami berharap agar kami dapat terus mendapatkan Forest Culture edisi berikutnya.

Hester Basoeki
Kampung Cinangneng, Bogor

Tambah Eksemplar

Bersama ini dengan hormat disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kiriman majalah Forest Culture.Kami sangat antusias sekali untuk mendapatkan nomor-nomor selanjutnya dan apabila memungkinkan mohon dikirimkan 3 (tiga) eksemplar setiap kali penerbitan, mengingat di instansi kami terdapat 2 (dua) seksi wilayah konservasi yaitu Seksi Konservasi Wilayah I Sarongan di Banyuwangi dan Seksi Konservasi Wilayah II Ambulu di Jember, yang juga membutuhkan informasi aktual sebagaimana dalam majalah Forest Culture.

Siswoyo
Taman Nasional Meru Betiri, Jember

Selamat dari Burung Indonesia

Burung Indonesia mengucapkan selamat kepada rekan-rekan Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) dan menyambut gembira atas terbitnya majalah Forest Culture yang membahas lingkungan, pendidikan, dan gaya hidup terkait dengan isu-isu pengelolaan sumberdaya alam.

Semoga majalah Forest Culture akan setia hadir dan memperkaya media informasi di komunitas pegiat konservasi dan lingkungan di Indonesia.

Sukianto Lusli
Burung Indonesia, Bogor

Kirimkan komentar, saran, dan kritik anda tentang FOREST CULTURE melalui fax redaksidi 0251 626593 atau melalui email ke : forestculture@latin.or.id

Redaksi menerima kontribusi foto, artikel, dan tulisan. Maksimal 2 halaman A4 atau 750 kata, termasuk foto, dikirimkan dalam format dijital.

Redaksi berhak sepenuhnya mengedit tulisan tanpa merubah maksud.

Anda juga tertarik untuk berlangganan FOREST CULTURE?, hubungi bagian sirkulasi FOREST CULTURE di sirkulasi_fc@latin.or.id
Ingin beriklan di FOREST CULTURE? Hubungi marketing_fc@latin.or.id

Menaruh Harapan Pada Kemitraan

Departemen Kehutanan melalui siaran persnya pada tanggal 3 Oktober 2006 mengklarifikasi pernyataan Menteri Kehutanan MS Kaban beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa Dephut akan membagikan lahan hutan seluas 1,5 juta ha di Pulau Jawa kepada masyarakat.

Pernyataan Menhut tersebut tentu saja sempat menimbulkan sebersit harapan bagi masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan, sebab bagi mereka lahan adalah sumber kehidupan.

Dalam siaran pers disebutkan Dephut tidak akan melakukan pembagian lahan hutan kepada masyarakat. Yang ada, masyarakat diberi akses untuk menanam, memelihara, dan mengatur panen produk-produk hutan. Luas hutan yang aksesnya akan dibuka kepada masyarakat ialah seluas 1,8 juta ha dengan bentuk pengelolaan secara kemitraan.

Apapun bentuk pengelolaan dan status kawasan hutan, yang terpenting bagi masyarakat adalah kepastian hukum untuk memperoleh manfaat jangka panjang, kejelasan hak dan kewajiban, serta kejelasan tata batas.

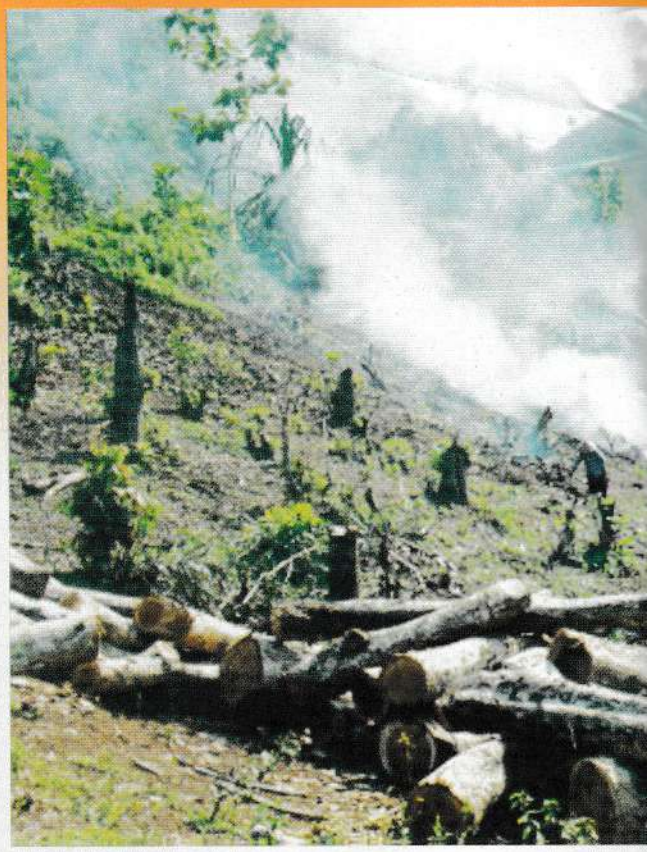
Tanpa ketiga hal tersebut, maka kemitraan yang akan dibangun bukanlah kemitraan yang sejati. Sebab, kemitraan sejati menuntut rasa percaya (*trust*) para pihak yang bermitra. *Trust* merupakan salah satu komponen terpenting kemitraan yang tercermin melalui kepastian hukum serta kejelasan hak, kewajiban, dan tata batas.

Arif Aliadi



Senyum masyarakat Desa Saninten - Pandeglang, Banten, seusai melakukan pemetaan wilayahnya bersama-sama. Foto : Saripudin

Angka petani yang hidupnya bergantung pada hutan. berkisar antara 12 juta sampai 65 juta orang. Besaran angka tersebut bisa jadi merupakan ancaman terhadap hutan atau malah sebaliknya, mereka bisa menjadi potensi untuk merehabilitasi dan menyelamatkan hutan.



Bumbu Tak Sedap Kehutanan Indonesia

Konflik telah lama menjadi bumbu tak sedap dalam dunia kehutanan Indonesia, namun penanganannya hingga kini dinilai belum dapat menyentuh akar persoalan.



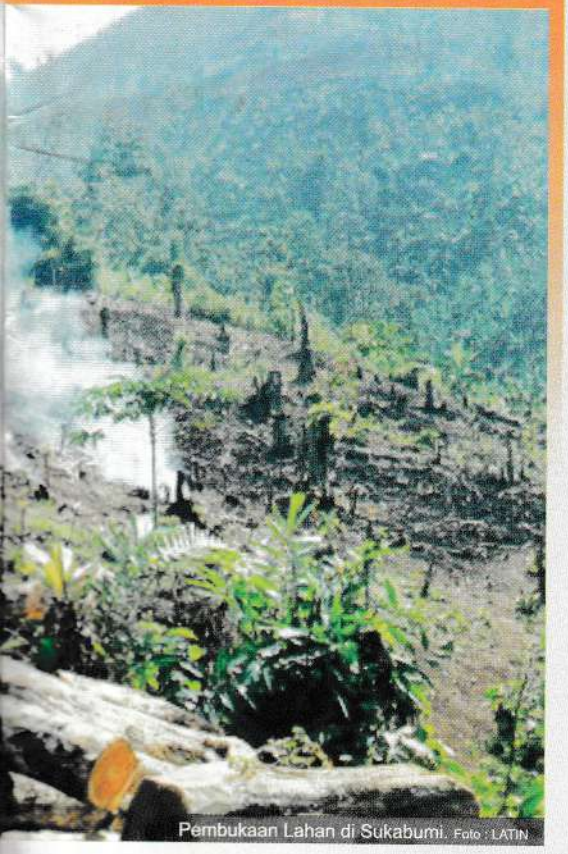
Konflik lahan di Kontu. Foto : Alimudin

Sebuah buku berjudul Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan dalam Perspektif Hukum yang diterbitkan Pustaka Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) pada Oktober 2006 memaparkan secara detail empat kasus konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan (pemerintah).

Kasus pertama mengetengahkan penangkapan atas 80 orang petani di hutan lindung Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kedua, penangkapan semena-mena warga Kontu dari wilayah hutan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ketiga, kasus pembakaran rumah petani di hutan lindung di Padang Cermin, Lampung Selatan. Yang terakhir, kasus kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya Murhum di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Menurut Suporahardjo, editor, yang juga Direktur Eksekutif LSM LATIN, penanganan konflik melalui kekerasan, seperti penangkapan petani, menyebabkan keluarga korban bertambah miskin.

"Sebagai contoh, keluarga petani yang ditangkap di Dompu rata-rata mempunyai hutang antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu dalam sebulan. Setelah ditangkap mereka divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara sekitar 6-10 bulan. Secara tidak langsung hal tersebut menyebabkan anak-anak korban penangkapan putus sekolah," ujarnya.



Pembukaan Lahan di Sukabumi. Foto : LATIN

Pakar ekologi manusia dari Institut Pertanian Bogor, Dr. Suryo Adiwibowo mengatakan kasus-kasus tersebut memperpanjang daftar derita masyarakat yang terpinggirkan dan mengalami kekerasan akibat kebijakan dan praktek-praktek pengelolaan hutan oleh negara.

"Salah satu hal menarik dari buku itu adalah adanya sambutan dari Menteri Kehutanan MS Kaban tentang program prioritas Departemen Kehutanan. Namun sayangnya, lima kebijakan prioritas yang digariskan Menhut belum memperlihatkan kesungguhannya untuk menyentuh berbagai konflik kehutanan yang berakar dari masalah sosio-agraria," tutur Adiwibowo.

Masalah sosio-agraria yang dimaksud, lanjutnya, antara lain akses masyarakat ke dalam kawasan hutan dan tata batas kawasan hutan.

Masalah akses terkait dengan boleh tidaknya masyarakat masuk ke kawasan hutan, misalnya untuk mengambil hasil hutan seperti kayu bakar, buah-buahan, tanaman obat, atau memanfaatkan lahan di kawasan hutan yang sudah gundul untuk dijadikan kebun buah bercampur dengan pepohonan hutan.

Sedangkan masalah tata batas terkait dengan tidak jelasnya batas kawasan hutan, sebab saat ini ada pal batas kawasan hutan yang terletak di pekarangan rumah penduduk.

Masalah sosio-agraria dalam kehutanan, kata Suporahardjo, tidak bisa diabaikan, karena menyangkut nasib jutaan petani yang hidupnya bergantung pada hutan.

"Angka petani yang hidupnya bergantung pada hutan berkisar antara 12 juta sampai 65 juta orang. Besaran angka tersebut bisa jadi merupakan ancaman terhadap hutan atau malah sebaliknya, mereka bisa menjadi potensi untuk merehabilitasi dan menyelamatkan hutan," ujarnya.

Suporahardjo menganggap masyarakat selama ini mempunyai potensi untuk menyelamatkan hutan. Hal itu bisa dilakukan, jika pemerintah membuka akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan.

"Pemerintah tidak perlu takut kepada masyarakat, karena mereka juga memiliki kearifan dalam mengelola hutan," tambahnya.

Menurut Adiwibowo hutan sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial. Salah satu contoh bisa dilihat di kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat Ngata Toro di Taman Nasional Lore Lindu. Masyarakat di sana mempunyai sistem tata ruang. Mereka membagi kawasan antara lain untuk dilindungi dan kawasan untuk dimanfaatkan. Mereka juga mempunyai 12 orang polisi adat yang bertugas mengawasi pelanggaran aturan tata ruang kawasan tersebut.

Contoh seperti masyarakat Ngata Toro sebenarnya banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Namun sayangnya, pemerintah belum mengakui dan mengakomodir kearifan masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan di Indonesia. Padahal pengakuan pemerintah disertai pemberian akses dan kejelasan tata batas dapat menjadi langkah penting untuk mengatasi konflik dalam dunia kehutanan yang sudah terjadi bertahun-tahun.

[Arif Aliadi dan Rudy Novira]



Demo Petani Kontu Foto : Alimudin

Contoh Kearifan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan

No.	Komunitas Pengelola	Lokasi	Sebutan Kawasan Yang Dikelola	Pengetahuan Lokal Yang Dikembangkan
1	Masyarakat adat Pesisir Krui (Sumber: de Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000)	Lampung Barat	Repong damar	Pemanfaatan resin (getah), buah-buahan, tumbuhan obat, kopi, cengkeh
2	Petani karet (Sumber: de Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000)	Jambi dan Sumatera Selatan	Kebun karet campuran	Pemanfaatan karet, palawija, buah-buahan, kayu bangunan, kayu bakar
3	Masyarakat adat Kalbar (Sumber: de Foresta, Kusworo, Michon, Djatmiko, 2000)	Sanggau, Kalbar	Tembawang	Pemanfaatan tengkawang, nyatuh, kemenyan, jelutung, pulai, damar, buah-buahan, jenis-jenis kayu, palem, rotan, sirih, pakis untuk sayur, tumbuhan obat

MEMANEN HARAPAN



Keluarga petani Dompu di kebun jambu mete

Bulan September 2005 merupakan saat yang tidak dapat dilupakan oleh Muhidin (39), petani asal Dompu, NTB. Ia tengah memanen jembu mete di kebunnya, di kawasan hutan SoNcando, Dompu, ketika petugas kehutanan menangkapnya.

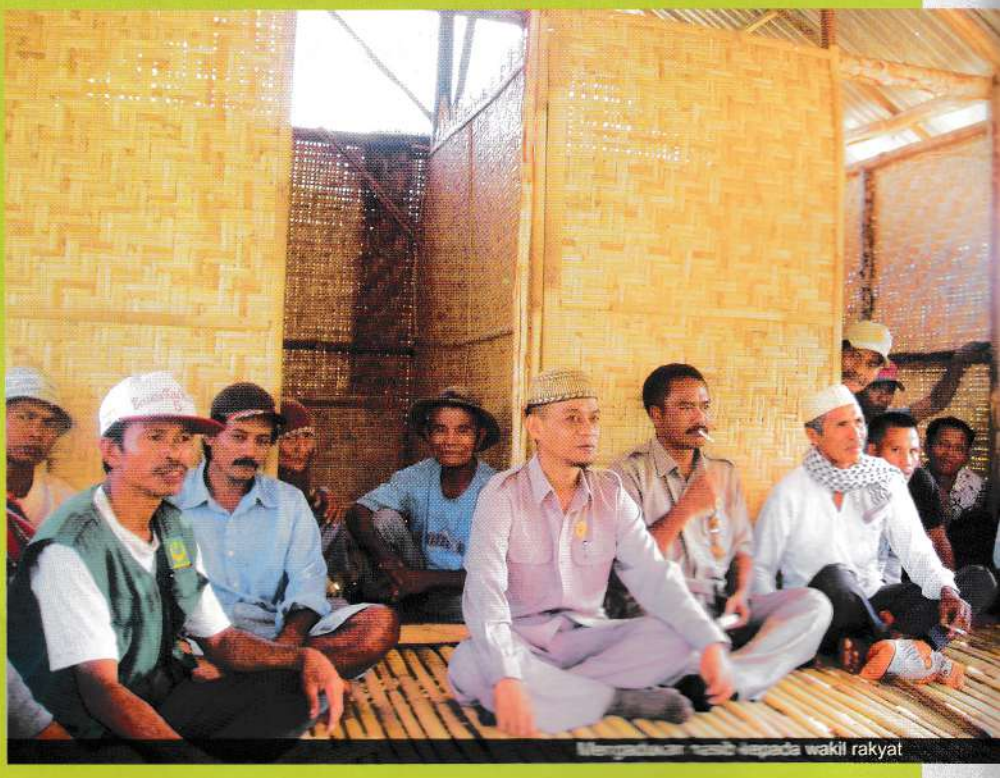
Hilang sudah kesempatan Muhidin memanen jambu mete. Padahal saat itu adalah panen pertamanya setelah selama lima tahun ia menanam dan merawat 200 pohon jambu metenya.

Semula Muhidin membayangkan penghasilan yang lumayan dari hasil panennya. Dalam benaknya ia memperkirakan akan mendapat uang sebesar Rp2.100.000 dari penjualan 300 kilogram jambu mete hasil panen tahun itu.

Setelah ditangkap, Muhidin disidik dan disidangkan. Pengadilan kemudian memutuskan ia, yang juga anggota kelompok Tani Hutan SoNcando Permai, bersalah karena menduduki kawasan hutan tanpa ijin. Vonis tersebut membuat Muhidin harus mendekam dalam sel tahanan selama sembilan bulan.

Ternyata Muhidin tidak sendirian, sebab ada 81 orang petani lainnya yang bernasib sama. Mereka juga dihukum karena dianggap menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sebab tidak memiliki ijin dari Menteri Kehutanan berdasarkan Undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, Pasal 50.

Persoalan ijin ini sebenarnya telah dibantah oleh Lenistan Nainggolan, salah seorang pengacara Muhidin dari Klinik Hukum. Di pengadilan, Lenistan menyatakan dalam UU Kehutanan disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa perijinan yang memerlukan ijin Menteri hanya dalam hal pengekplorasian atau ekploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan. Jadi, dalam kasus Muhidin ini seharusnya ijin cukup dari Pemerintah Kabupaten Dompu.


Mengadukan nasib kepada wakil rakyat

KOSONG



Gubuk kerja petani yang dibakar saat penangkapan petani di Dompu

Lenistan mengatakan, ada 12 dokumen surat resmi yang diajukan ke pengadilan sebagai bukti. Salah satunya Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) Nomor: 522.3/366/BH/2003 antara Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu dengan kelompok Tani Hutan SoNcando Permai. Surat Perjanjian tersebut juga dilandasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Perda PHBM).

"Selain itu ada surat keputusan dari Bupati Dompu yang menjelaskan tentang tenaga pendamping untuk kelompok Tani Hutan SoNcando Permai. Ini artinya Pemerintah Kabupaten Dompu sudah merestui kegiatan petani di kawasan hutan," ujar Lenistan.

Namun hakim tidak menerima argumen tersebut. Semua dokumen surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Dompu tidak dipertimbangkan dan tidak bisa digunakan sebagai ijin untuk mengelola hutan. Menurutnya ijin dari Menteri Kehutanan tetap diperlukan.

Direktur YP2MD (Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa) yang menjadi pendamping kelompok tani SoNcando Permai, Muttakun, mengatakan kasus Dompu mencerminkan ketidakpastian hukum bagi para petani untuk berpartisipasi dalam mengelola hutan, khususnya rehabilitasi hutan.



Para petani Dompu menanti kepastian di balik jeruji besi

"Sebenarnya jambu mete yang ditanam Muhidin dan para petani lain justru bisa menghijaukan lahan yang sebelumnya sudah kritis. Namun, kami menghormati keputusan pengadilan," ujarnya.

Dikatakannya, sejak Agustus 2006, YP2MD berusaha memfasilitasi pembentukan Tim Pengkajian, Pengendalian, dan Rehabilitasi Hutan. Tim ini merupakan tim terpadu yang terdiri dari berbagai instansi di Dompu.

"Salah satu tugas tim ini adalah mengusulkan kepada Menteri Kehutanan tentang kawasan hutan yang dapat dikelola masyarakat di Dompu. Hal ini merupakan salah satu langkah kami untuk memperoleh ijin dari Menteri Kehutanan," tambah Muttakun.

Sayangnya, harapan Muhidin belum bisa terwujud, sebab proses perijinan membutuhkan waktu lama. Saat ini ia hanya bisa berharap suatu saat dapat kembali ke kebunnya dan memanen jambu metenya tanpa perlu kuatir ditangkap petugas.

[Arif Aliadi; foto-foto : YP2MD]

Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat

Perencanaan Ala Masyarakat Saninten

Disaat banyak pihak di Pandeglang memperdebatkan status dan nasib kawasan Akarsari (Gunung Aseupan, Karang, dan Pulosari) yang merupakan 'menara air' Propinsi Banten, desa yang terletak di lereng Gunung Karang ini mencoba mewujudkan mimpi tentang Akarsari dengan membuat Perencanaan Desa Berbasis Masyarakat.



Musyawarah Perencanaan Desa


Pemetaan tata batas di hutan



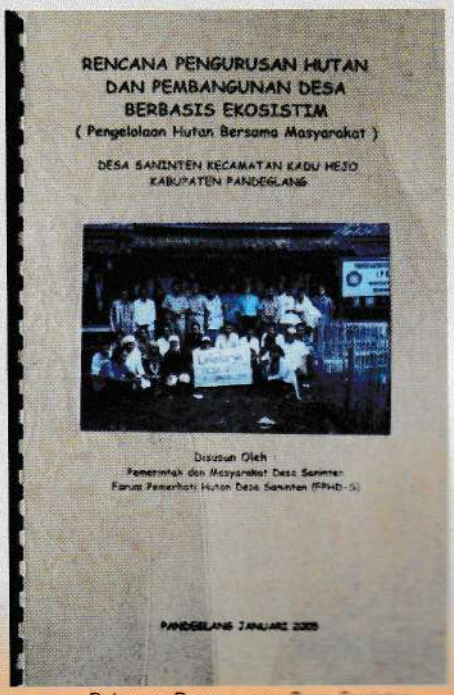
Peta-peta perencanaan Desa Saninten

Bekerja merupakan sesuatu yang lebih nyata untuk memperbaiki keadaan dari pada sekedar berbicara. Rasanya ungkapan ini sesuai dengan keadaan masyarakat Desa Saninten, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten.

Disaat banyak pihak di Pandeglang memperdebatkan status dan nasib kawasan Akarsari (Gunung Aseupan, Karang, dan Pulosari) yang merupakan 'menara air' Propinsi Banten, desa yang terletak di lereng Gunung Karang ini mencoba mewujudkan mimpi tentang Akarsari dengan membuat Perencanaan Desa Berbasis Masyarakat.

Perencanaan bukanlah kata yang asing, namun perencanaan berbasis masyarakat mungkin masih jarang terdengar. Di Saninten kita akan melihat bukti nyata dari rangkaian empat kata itu; Perencanaan Desa Berbasis Masyarakat. Adapun pengertian berbasis masyarakat tak lain adalah seluruh proses perencanaan sejak mula hingga akhir dilakukan oleh dan untuk masyarakat sendiri.

Bekerja bersama-sama merupakan kuncinya. Semua pihak di desa dan pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam aktifitas tersebut. Mulai dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, LSM, swasta, hingga ke desa tetangga. Seluruh komponen di Saninten bergandengan tangan guna mewujudkan "miniatur" Akarsari yang lebih baik.


RENCANA PENGURUSAN HUTAN
DAN PEMBANGUNAN DESA
BERBASIS EKOSISTIM
(Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)

DESA SANINTEN KECAMATAN KADU HEJO
KABUPATEN PANDEGLANG

Disusun Oleh :
Pemerintah dan Masyarakat Desa Saninten
Forum Pemerhati Hutan Desa Saninten (FPHD-S)

PANDEGLANG JANUARI 2005

Dokumen Perencanaan Desa Saninten

Bagaimana kerja sama tersebut dapat dibangun? "Kepercayaan merupakan awalnya," seperti yang dikatakan Saripudin, staf LATIN sebuah LSM yang mendampingi masyarakat Saninten beberapa tahun terakhir.

Membangun kepercayaan tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun dengan mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan bermanfaat yang dapat meningkatkan taraf kehidupan, maka lambat laun hasilnya menjadi tumpukan kepercayaan.

"Masyarakat Saninten sadar masa depan dimulai dari sekarang. Artinya perencanaan desa harus dibuat berdasarkan situasi dan kondisi desa Saninten saat ini, seperti keadaan fisik, sosial, budaya, sejarah, agama, dan sebagainya," tutur Saripudin.

Perencanaan desa dimulai dengan mengumpulkan informasi mengenai desa, seperti potensi sumber daya alam, hutan, wisata, infrastruktur, dan penggunaan

> **.....dengan adanya informasi ini, masyarakat dan pihak lain tahu bagaimana situasi dan kondisi yang ada, dan menjadi sadar apa yang harus dilakukan agar semakin hari kawasan Akarsari semakin baik dan tetap menjamin kehidupan masyarakat di sekitarnya.**

tanah. Kemudian mereka mewujudkannya dalam bentuk peta-peta setelah sebelumnya dilakukan pemetaan dan inventarisasi secara bersama-sama atau partisipatif.

Setelah semua informasi tersebut terkumpul, kembali secara bersama-sama mereka melakukan analisis informasi. Hasil analisis ini kemudian menghasilkan berbagai rencana yang akan dilakukan untuk membangun desa Saninten dan juga kawasan Gunung Karang. Rencana tersebut tidak hanya disepakati oleh warga Desa Saninten saja namun juga oleh para pihak lainnya.

Menurut Omang, staf pemerintah Desa Saninten, dengan adanya informasi ini, masyarakat dan pihak lain tahu bagaimana situasi dan kondisi yang ada, dan menjadi sadar apa yang harus dilakukan agar semakin hari kawasan Akarsari semakin baik dan tetap menjamin kehidupan masyarakat di sekitarnya.



Perempuan Saninten sedang membuat jamu; salah satu pemanfaatan hasil hutan non kayu

"Adanya informasi lokasi hutan yang sudah rusak dan jika dibiarkan lambat laun bisa mendatangkan bencana seperti longsor, adalah salah satu contoh informasi penting yang perlu diketahui bersama. Sehingga masyarakat dan semua pihak menjadi lebih bijak dalam memanfaatkan potensi desa dan kawasan Akarsari," tambah Omang.

Masyarakat juga menjadi siap menghadapi berbagai hal yang terkait dengan pembangunan desa dan juga kawasan Akarsari, karena mereka mempunyai pegangan hasil perencanaan tersebut yaitu Dokumen Perencanaan Desa yang berisi semua informasi, keinginan, dan tanggung jawab atas desa dan Akarsari.

Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat dan juga pihak lain yang berkepentingan tahu yang terbaik bagi Akarsari serta tahu bagaimana menanggapi situasi dan kondisi yang ada, sehingga semakin hari kawasan Akarsari semakin baik dan dapat menjamin kelangsungan hidup anak cucu mereka kelak.

Salah satu perencanaan yang sudah dilakukan adalah pengaturan pengelolaan air dari mata air di Gunung Karang. Adanya penentuan kawasan tertutup bagi semua aktifitas di Gunung Karang pada ketinggian lebih dari 1000 m menjadikan kondisi air dan tanah terlindungi.

Dengan segala kelebihan dan keterbatasannya itu, Saninten adalah contoh keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan masa depan atas ruang hidupnya. **[Nana Rusyana; foto-foto oleh Saripudin]**



Hutan Alam di Gunung Karang



LAPANGAN SEMPUR

Ruang Publik Kota Hujan

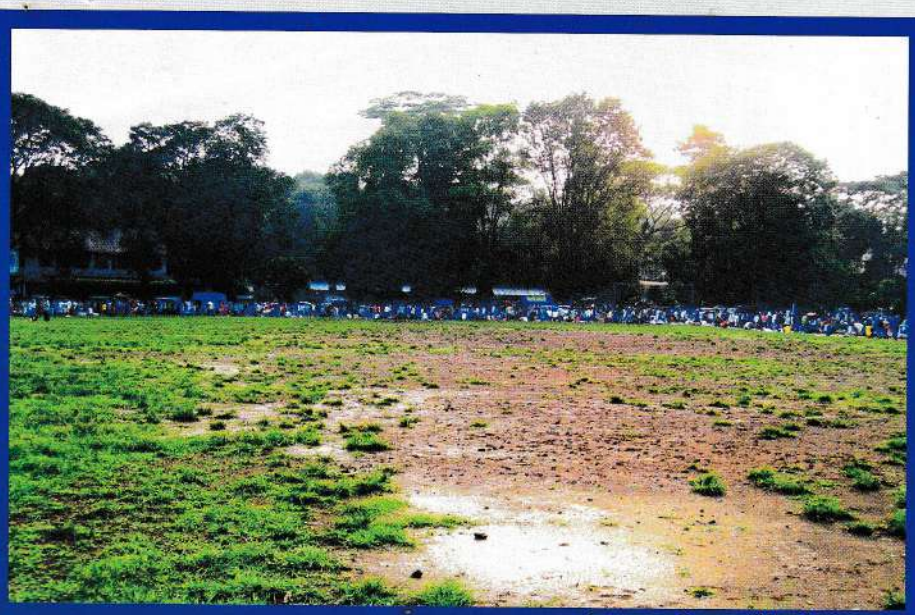
Sudah tiga putaran Ibu Hasby *jogging* mengelilingi lapangan Sempur Bogor pada hari Minggu yang masih sangat pagi. Setengah bergegas ia melangkahkan kakinya untuk menyelesaikan beberapa putaran lagi, sebab tak lama lagi lapangan Sempur akan ramai oleh orang yang mengisi hari Minggunya tidak hanya untuk berolah raga, tapi juga untuk berdagang dan makan-makan.

Sejak awal berdirinya hingga kini, lapangan Sempur telah menjadi ruang publik bagi warga Bogor. Ditengah minimnya fasilitas umum, keberadaan lapangan Sempur ibarat oase di gurun pasir. Lapangan ini dilengkapi fasilitas lapangan olahraga seperti lapangan sepak bola, basket, volley, dan lintasan lari. Aktivitas olah raga ringan juga sering terlihat di lapangan ini pada pagi, sore, bahkan malam hari.

Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, membuat lahan seluas 1.845 m2 milik Pemerintah Daerah Kota Bogor ini sering dijadikan tempat untuk berbagai kegiatan yang mendatangkan orang banyak. Mulai dari kampanye, demonstrasi, pameran, tabliq akbar, hingga pagelaran musik yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi swasta. Semua kegiatan tersebut menunjukkan betapa pentingnya keberadaan lapangan Sempur.

Sebagai fasilitas publik milik pemerintah, Pemkot Bogor tentunya bertanggung jawab mengelola lapangan Sempur dengan baik sesuai peruntukkannya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang pro kepada publik untuk menjaga keberadaan dan keberlangsungan fasilitas umum tersebut.

Dalam perkembangan perkotaan, kualitas ruang publik bergantung pada negosiasi kepentingan antara tiga kekuatan, yaitu swasta, publik, dan negara. Masalah akan muncul jika terjadi ketidakseimbangan, terutama ketika ruang publik hanya dipandang sebagai komoditas yang bisa dengan mudah diperjual-belikan oleh pemerintah. Jika hal itu terjadi, maka ruang publik hanya ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan modal pihak swasta.



Lapangan Sempur di hari Minggu pagi

Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2003, sekelompok warga Bogor menggelar protes di lapangan Sempur. Mereka menunjukkan rasa tidak puas atas atas kebijakan Pemkot Bogor yang mengganti rumput di lapangan sepak bola itu dengan *conblock* atau biasa disebut *grassblock*.

Sebelumnya warga telah meminta DPRD untuk menghentikan pemasangan *grassblock* tersebut. Merasa aspirasinya tak disambut, warga yang tergabung dalam Masyarakat Bogor Peduli Lapangan Sempur kemudian berdatangan ke lapangan Sempur. Puncak aksi protes itu diwujudkan dengan "menyegel" *grassblock* yang telah dipasang disekitar seperempat lapangan itu. Sehelai kain putih sepanjang 250 meter bertuliskan "*Kembalikan Rumput Lapangan Sempurku*" dan dipenuhi dengan tanda tangan warga dibentangkan.

Pemasangan *grassblock* itu sebenarnya sudah lama diwacanakan oleh Pemkot Bogor dengan pertimbangan lapangan Sempur selama ini sering digunakan sebagai lokasi pameran dan pertunjukan musik. Dengan kondisi berumput, lapangan yang berada di tepi Sungai Ciliwung itu menjadi tidak nyaman untuk acara semacam itu, terlebih lagi jika hujan mengguyur.

Namun rencana pemasangan *conblock* itu ternyata malah menimbulkan protes dari warga. Apalagi ada kecurigaan dalam masyarakat bahwa pemasangan *grassblock* tersebut berkaitan dengan persiapan menyongsong Pemilu.

Warga baru bisa merasa lega setelah kemudian Pemkot Bogor mengembalikan rumput di lapangan Sempur. *Grassblock* yang semula dipasang di tengah lapangan dialihkan ke lingkar luar lapangan. Menurut Sekretaris Daerah Kota Bogor saat itu, Deddy S. Hamdan, pemasangan *grassblock* diprioritaskan di lingkar luar lapangan untuk mengoptimalkan pekerjaan drainase.

Ketua Bidang Pelestarian Arsitektur dari Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Jakarta, Hasan Halim mengatakan masyarakat harus kuat dan konsisten menuntut tersedianya ruang publik kota. Masyarakat juga yang harus berperan serta dalam perawatan ruang publik, terutama pada tingkat semi privat, seperti taman di kompleks perumahan. Rasa kepemilikan masyarakat terhadap ruang publik nantinya membawa mereka pada niat untuk menjaganya bersama-sama.

Oleh karena itu, mari kita berharap semoga saja lapangan Sempur akan tetap bertahan sebagai ruang publik yang bermanfaat bagi publik, khususnya bagi warga Bogor.

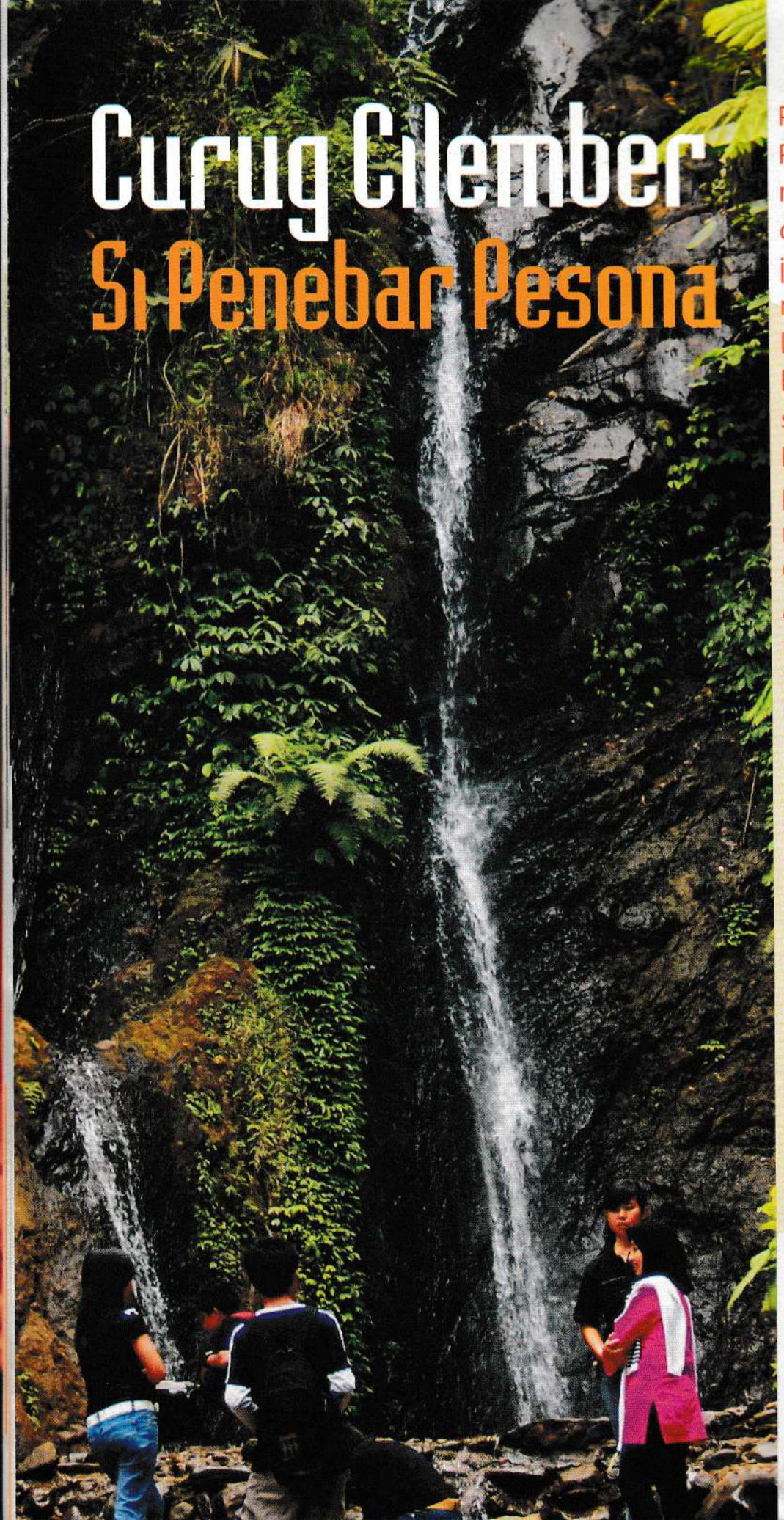
[Rudy Novira; beserta foto-foto]

“Masyarakat harus kuat dan konsisten menuntut tersedianya ruang publik kota. Masyarakat juga yang harus berperan serta dalam perawatan ruang publik, terutama pada tingkat semi privat, seperti taman di kompleks perumahan. Rasa kepemilikan masyarakat terhadap ruang publik nantinya membawa mereka pada niat untuk menjaganya bersama-sama.

Selain untuk berolahraga, Lapangan Sempur juga merupakan tempat bersantai bagi warga kota Bogor



Curug Cilember
Si Penebar Pesona



Perjalanan berwisata ke Puncak acapkali menambah kepenatan dan tingkat stress karena jalur Puncak yang selalu macet pada masa-masa libur. Tetapi jangan khawatir, bagi Anda yang sering berakhir pekan di Puncak, perpendeklah perjalanan Anda dengan menyinggahi Wana Wisata Curug Cilember di Desa Megamendung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Lokasi wisata ini berada di lembah Gunung Hambalang tepatnya enam kilometer dari jalan raya Bogor-Puncak. Tidak terlalu sulit untuk mencapai kawasan ini karena jalan masuk sudah teraspal dengan baik.

Dari namanya, Wana Wisata Curug Cilember, dapat dipastikan bahwa atraksi utama tempat wisata ini adalah air terjun yang berjumlah tujuh buah.

Air terjun pertama yang disebut Curug 6 dan 7 akan segera Anda temukan dengan berjalan menyusuri jalan berbatu yang sedikit menanjak sejauh 300 m dari gerbang loket. Inilah air terjun paling tinggi diantara yang lainnya. Di dasar curug Perum Perhutani Unit III Jabar-Banten selaku pengelola membangun kolam pemandian dengan membendung aliran air.

Untuk Anda yang gemar lintas alam, silahkan pacu stamina Anda dengan mengunjungi kelima curug lainnya yang cukup menantang. Karena jalan yang harus Anda lalui berupa jalan setapak dan terjal.

Setelah puas menikmati keindahan ketujuh buah curug maupun bermain



Taman Kupu-Kupu



Pintu Masuk

air, Anda dapat mengistirahatkan tubuh Anda dengan menggelar tikar atau menyewa tenda di lokasi kemping yang sudah disediakan pengelola kawasan ini.

Bagi Anda yang tidak membawa bekal, tidak perlu khawatir kelaparan, karena di lokasi wisata ini terdapat deretan warung-warung yang menjual beragam jenis makanan dan minuman. Mulai dari mie bakso hingga jagung bakar. Mulai dari nasi rames hingga gado-gado.

Kawasan wisata alam ini dikelola bersama-sama antara Perum Perhutani bersama dengan masyarakat lokal dalam kerangka Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dengan demikian, kunjungan Anda di kawasan ini akan membantu pengelolaan hutan di sekitar Cilember maupun Gunung Hambalang serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Setelah beristirahat ada baiknya Anda mengunjungi Taman Kupu-kupu .

Terdapat 12 jenis kupu-kupu yang ditangkarkan di tempat ini. Spesies terbanyak adalah *Papilio memnon* dan *Troides Helena* atau Kupu-kupu Raja. Jika beruntung Anda pun dapat melihat ulat dan kepompong yang sama cantiknya.

Untuk menambah kenyamanan berkunjung, pihak pengelola juga memfasilitasi kawasan ini dengan *jogging track*, *guest house*, aula, mushola, dan beberapa toilet.

[Pagitta Tarigan dan Sri Nuryani - termasuk foto-foto]

> “
>
> .....kunjungan Anda di kawasan ini akan membantu pengelolaan hutan di sekitar Cilember maupun Gunung Hambalang serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Jembatan Goyang Cinta





Guest House

Perencanaan Hutan Komunitas oleh Masyarakat Creston


30% pohon disisakan tidak ditebang


Lembah Creston

Kota Creston, Kanada, terletak di wilayah Kootenay bagian tenggara British Columbia, dekat perbatasan Amerika Serikat. Hutan di sekitar kota yang berpopulasi 4800 jiwa ini ditumbuhi pepohonan berdaun jarum, seperti pinus dan cemara. Hutan ini kemudian disebut hutan komunitas, karena dikelola oleh masyarakat Creston.

Hutan komunitas Creston dijalankan berdasarkan sebuah kerjasama yang anggotanya terdiri dari penduduk Kota Creston, *the Regional Central Kootenay, Creston Area Economic Development Corporation, the Lower Kootenay Indian Band*, dan *the East Kootenay Environmental Society*. Masing-masing pihak kemudian memilih wakil mereka untuk duduk sebagai direktur pelaksana dalam pengelolaan hutan komunitas Creston. Kelima direktur tersebut setiap tahunnya bertugas memilih lima orang lainnya dari masyarakat sebagai direktur tambahan.

Lahirnya hutan komunitas ini sebenarnya merupakan akhir dari 25 tahun perlawanan masyarakat terhadap pembalakan yang berlangsung di wilayah resapan air di Creston. Perjuangan masyarakat untuk membangun Hutan Creston dimulai pada tahun 1990-an. Ketika itu beberapa orang penentang pembalakan memimpin promosi hutan komunitas, yang tujuan utamanya untuk melestarikan daerah resapan air.

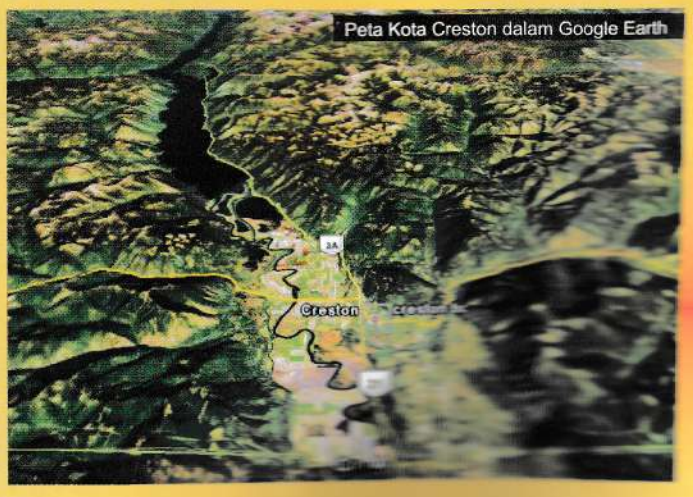
Hutan komunitas Creston berada di atas lahan seluas 12.800 hektar. Delapan ribu lima ratus hektar diantaranya adalah daerah resapan air Arrow Creek yang merupakan sumber air bagi Kota Creston, perkebunan, dan perusahaan bir Columbia Breewing. Selain itu, kawasan resapan air juga menjadi kawasan wisata yang penting di Creston.

Pada tahun 1997 Hutan komunitas Creston resmi terbentuk. Semula ijin pengelolaan Hutan Creston diberikan berdasarkan jumlah volume kayu yang boleh ditebang, dengan perincian jumlah kayu yang bisa dikeluarkan dari hutan sebanyak 15.000 meter kubik per tahun selama periode 15 tahun. Setelah itu, ijin pemanfaatan kayu tidak dapat diperpanjang untuk kedua kalinya.

Kondisi tersebut membuat Dewan Hutan Komunitas Creston berusaha mencari kemungkinan untuk mengubah ijin. Mereka ingin agar ijin mengelola hutan tidak lagi berdasarkan pada volume kayu yang bisa dimanfaatkan, tapi berdasarkan pada luas kawasan, dengan demikian periode pengelolaan hutan bisa lebih lama dan areal pengelolaan hutan lebih luas dari sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2002 / 2003 *Silva Forest Foundation* (LSM kehutanan di Kanada) dan Manajer Hutan Komunitas Creston, Jim Smith bekerjasama menyiapkan peta perencanaan hutan yang baru dengan menggunakan pendekatan ekosistem.

Dengan adanya perencanaan yang baru tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui daerah hutan yang dilindungi dan daerah hutan yang bisa dilakukan



Peta Kota Creston dalam Google Earth



Penebangan Mengelompok, tampak dari udara



Memonitor Kualitas Air

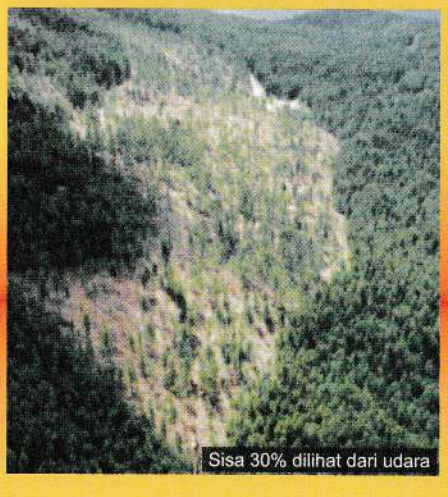


Bunga Ladyslippers

penebangan. Dengan demikian habitat satwa liar, kualitas air, dan keanekaragaman hayati seperti Bunga Ladyslipper di hutan komunitas Creston tetap terjaga.

Saat ini masyarakat Creston telah melakukan penebangan di hutan komunitas sesuai rencana baru dan mampu menghasilkan 85.000 m^3 kayu dari 19 blok tebangan. Hasil pembalakan juga memberikan kontribusi kepada pemerintah provinsi berupa bibit senilai satu juta dollar. Disamping itu, hutan komunitas juga menyediakan lebih dari 25 pekerjaan paruh waktu bagi masyarakat dan memberikan 1.5 juta dollar pemasukan untuk perekonomian lokal.

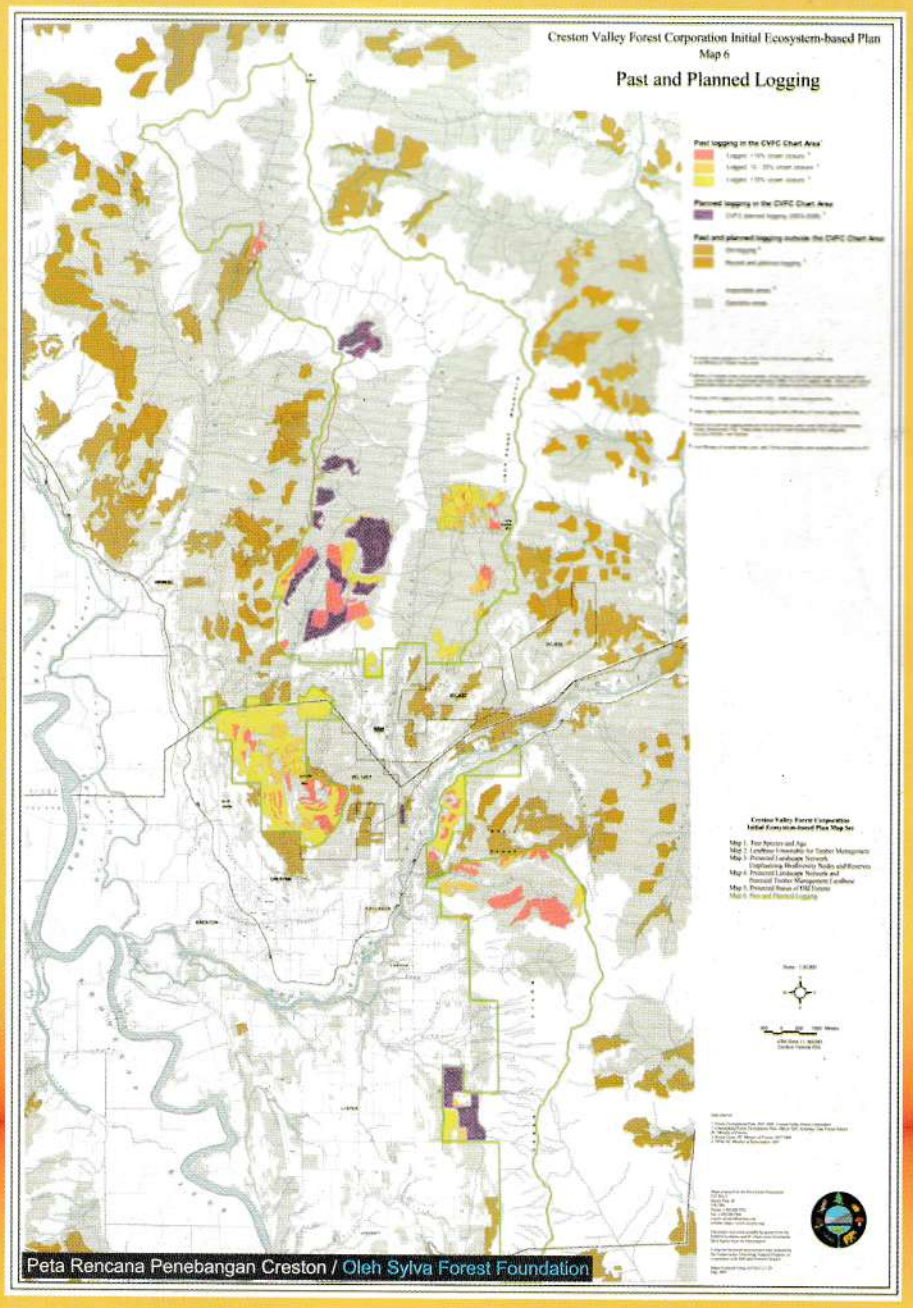
Penebangan di hutan komunitas Creston dilakukan secara selektif melalui tiga tahap. Tahap pertama seleksi pohon, yaitu menebang pohon-pohon terjelek dan meninggalkan pohon terbaik. Kedua, menebang beberapa pohon sekaligus di area berbentuk lingkaran. Diameter lingkaran di area tebang tidak boleh lebih dari dua kali tinggi pohon. Yang ketiga adalah penebangan intensif, yaitu menebang 70% pohon yang ada dan menyisakan 30% pohon terbaik yang sehat dan terbesar.



Sisa 30% dilihat dari udara

Keberadaan hutan komunitas Creston membuktikan sebetulnya masyarakat setempat dan kelompok *stakeholder* yang mempunyai kepentingan berbeda bisa mengelola hutan secara baik dan lestari.

[Disarikan oleh Rosita Dewi dan Arif Aliadi dari Sylva Forest Foundation Canada. Foto : www.crestonbc.com]



Peta Rencana Penebangan Creston / Oleh Sylva Forest Foundation

Berbuka Bersama Anak Yatim

Memperingati ulang tahunnya yang ke-17, Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) mengadakan acara berbuka puasa bersama anak yatim dan warga sekitar di Pendopo Latin, Kamis, 5 Oktober 2006.

Acara ini didahului dengan pemutaran film dokumenter "Wajah-wajah Islam Indonesia" yang mendapat sambutan antusias para undangan. Dilanjutkan kemudian dengan mendengarkan siraman rohani dari Ustadz Uci Sanusi, imam Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Situgede, Bogor Barat.

Ketua panitia kegiatan ini, Asep U. Jaya menjelaskan acara ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan LATIN yang bertujuan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT dan menjalin silahtuhrahmi dengan masyarakat sekitar. "Sedangkan kegiatan penyantunan anak yatim merupakan suatu amaliah dari segenap LATINER dalam menjalankan ibadah puasanya dengan menyumbangkan sedikit rejekinya buat mereka," tambah Asep.



Sebelum acara diakhiri dengan berbuka bersama, 25 orang anak yatim mendapatkan santunan yang diberikan secara bergilir, masing-masing oleh Rudy Novira (Ketua Yayasan LATIN), Dwi Rahmad Muhtaman (Sekretaris Yayasan LATIN), Suporahardjo (Direktur Eksekutif LATIN), Arif Aliadi serta Ganip Gunawan. **[PT]**

Bedah Buku Kekerasan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Menindaklanjuti hasil workshop bertema Kekerasan dalam Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Ditinjau dalam Perspektif Hukum pada akhir Juli 2006, LATIN mengadakan acara bedah buku dengan judul yang sama pada Selasa, 10 Oktober 2006.

Sebagai pembicara dalam bedah buku tersebut adalah Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, M.S. dari Departemen Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

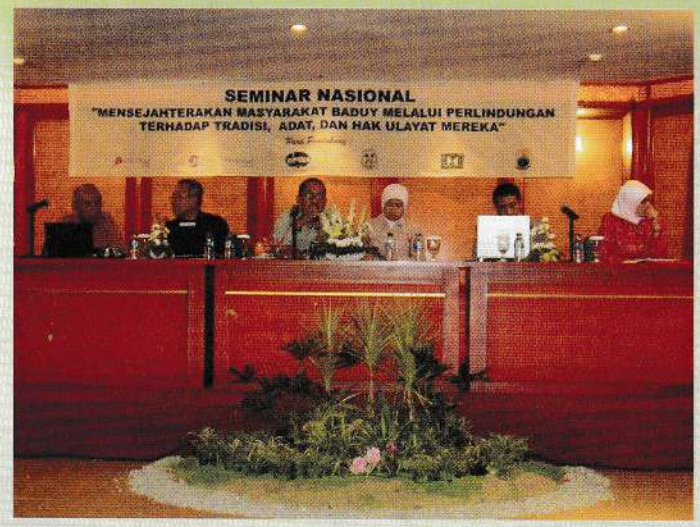
Selain dihadiri oleh rekan-rekan LSM lingkungan se-Bogor, hadir pula murid-murid dari SMP Kornita Bogor, SMP Budi Bakti, dan santri dari Pesantren Alqur'an Wal Hadist

Acara bedah buku didahului oleh pemutaran film dokumenter "Super Size Me" dan soft launching majalah Forest Culture. Kemudian diakhiri dengan buka puasa bersama. **[PT]**



Redaksi FOREST CULTURE menerima info kegiatan dari lembaga atau perusahaan anda untuk rubrik Community dan Relation. Kegiatan yang berhubungan dengan alam, lingkungan, atau sosial kemasyarakatan. Sertakan identitas yang lengkap, jelas, dan bisa dikonfirmasi. Kirimkan ke alamat redaksi. Untuk informasi liputan hubungi forestculture@latin.or.id atau kontak di 0251 420522, fax di 0251 626593

Seminar Nasional Masyarakat Baduy



Keprihatinan terhadap pergeseran nilai-nilai budaya yang terjadi di masyarakat Baduy akibat pengaruh modernisasi telah mendorong Paguyuban Warga Banten (PUWNTEN) dan Yayasan Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (WAMMBY) melaksanakan seminar nasional bertajuk "Mensejahterakan Masyarakat Baduy Melalui Perlindungan Terhadap Tradisi, Adat dan Hak Ulayat Mereka", Sabtu (4/11) di Hotel Le Dian's, Serang, Banten.

Seminar yang dihadiri oleh 100 undangan itu dibuka oleh Mendagri Muhammad Ma'ruf yang sekaligus bertindak sebagai keynote speaker. Mendagri dalam sambutannya menyatakan sejalan dengan upaya perlindungan dan pelestarian sistem nilai masyarakat Baduy, termasuk perlindungan terhadap tanah ulayatnya yang menjadi sumber kehidupannya, maka pengembangan kualitas kehidupan masyarakat Baduy harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah.

"Pelaksanaan program pembangunan harus senantiasa dilandasi pada esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Baduy. Apabila pelaksanaan program pembangunan ekonomi tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Baduy, maka program tersebut akan menjadi mubazir bahkan dapat menciptakan keterasingan masyarakat Baduy di tengah-tengah aktivitas pembangunan yang sedang kita laksanakan," lanjut Mendagri.

Seminar juga dihadiri oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Lingkungan Hidup, PLT Gubernur Propinsi Banten. Tokoh nasional asal Banten juga hadir seperti Taufikurahman Ruki yang juga menjadi ketua panitia serta Suryadi Sudirja, mantan Gubernur DKI Jakarta.

Makalah utama yang dipaparkan adalah hasil penelitian PUWNTEN tentang struktur sosial masyarakat Baduy, perubahan sosial yang melanda masyarakat Baduy, mata pencaharian mereka, tanah ulayat, serta dampak wisata terhadap masyarakat Baduy. **[Arif Aliadi]**

PT. Inti Cipta Biotek Bijana (ICBB),

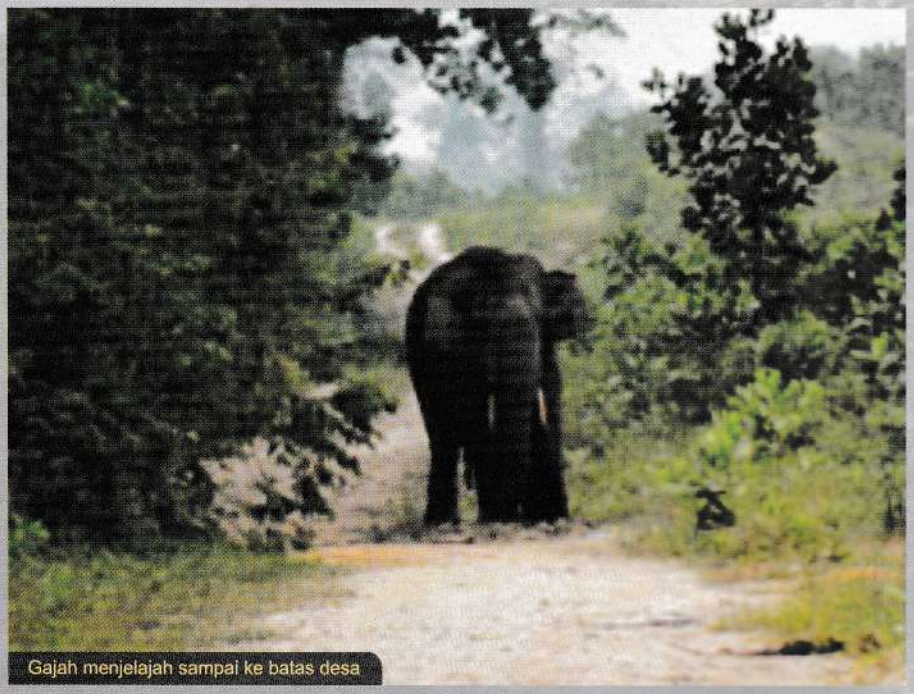
pada tanggal 5 dan 19 Agustus 2006 telah mengadakan "Pelatihan Kultur Jaringan, Pembibitan dan Budidaya Jarak Pagar". Bertempat di ICBB Complex, Cilubang, Kelurahan Situgede Bogor. Kegiatan yang dilakukan berupa tatap muka dengan materi Pengenalan Kultur Jaringan, Metode Perbanyakan Melalui Kultur Jaringan, Teknik Pembibitan Jarak Pagar, Analisa Usaha Budidaya Jarak Pagar. Praktek Laboratorium dengan materi Pengenalan Alat dan Bahan untuk Kultur Jaringan, Pemilihan Eksplan dan Inisiasi Kalus, Tahap Induksi dan Elongan Tunas, Aklimatisasi. Praktek Lapangan yang meliputi Seleksi Benih untuk Bibit dan Pembibitan Jarak Pagar. Pelatihan ini yang ditujukan untuk umum, mahasiswa dan guru SMA merupakan kalender rutin dari ICBB. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-mail: pticbb@yahoo.co.id. **[RN]**



Kalus Jarak Pagar, salah satu materi yang dilatihkan dalam Peltaihan Kultur jaringan, Pembibitan dan Budidaya Jarak Pagar

Wilayah Jelajah Margasatwa

Pada 22 Februari 2006 di dekat Hutan Mahato, perbatasan Riau dan Tapanuli Selatan, enam ekor gajah ditemukan mati (KCM, 2 Maret 2006). Menurut Syamsuardi, Human Elephant Conflict Officier Riau, kematian gajah-gajah tersebut diduga karena menelan racun potassium. Mereka ditemukan dalam kondisi mulut berbusa.



Gajah menjelajah sampai ke batas desa



Hutan yang rusak memaksa gajah sampai ke wilayah masyarakat

Kuat dugaan gajah-gajah tersebut diracun karena manusia menganggap gajah mengancam rumah dan kebunnya. Mereka mengagapnya sebagai hama yang harus dibasmi, tidak peduli bahwa gajah tersebut terpaksa keluar hutan karena tempat tinggalnya rusak.

Apakah yang sebenarnya menyebabkan hewan-hewan liar ini merambah wilayah manusia (kebun/lahan pertanian)?

Pada dasarnya hewan-hewan liar memiliki suatu wilayah jelajah, tempat ia dan keluarganya mencari makanan dan memenuhi keperluan-keperluan hidupnya yang lain. Bagian tertentu dari wilayah jelajah yang disebut teritori, bahkan dijaganya dengan keras dari gangguan pihak lain.

Kita bandingkan seekor melihat kucing untuk mempertahankan kemihnya pada

pojok rumah, pangkal pohon, atau malahan menciprati ban kendaraan. Itu adalah upaya untuk menandai teritorinya. Kucing jantan lain yang kesasar masuk, diharapkan tahu diri dan menyingkir; atau akan menghadapi perkelahian dengan jantan pemilik teritori. Dipikir-pikir, agak mirip juga dengan preman Tanah Abang.

[Wibowo A. Djatmiko]

Foto-foto : WWF-Indonesia/Syamsuardi dari www.wwf.or.id



Rumah yang dirusak gajah di Riau





Gajah Sumatera yang diduga mati diracun di Riau

Memandang Gunung Salak di **SUATU KETIKA**

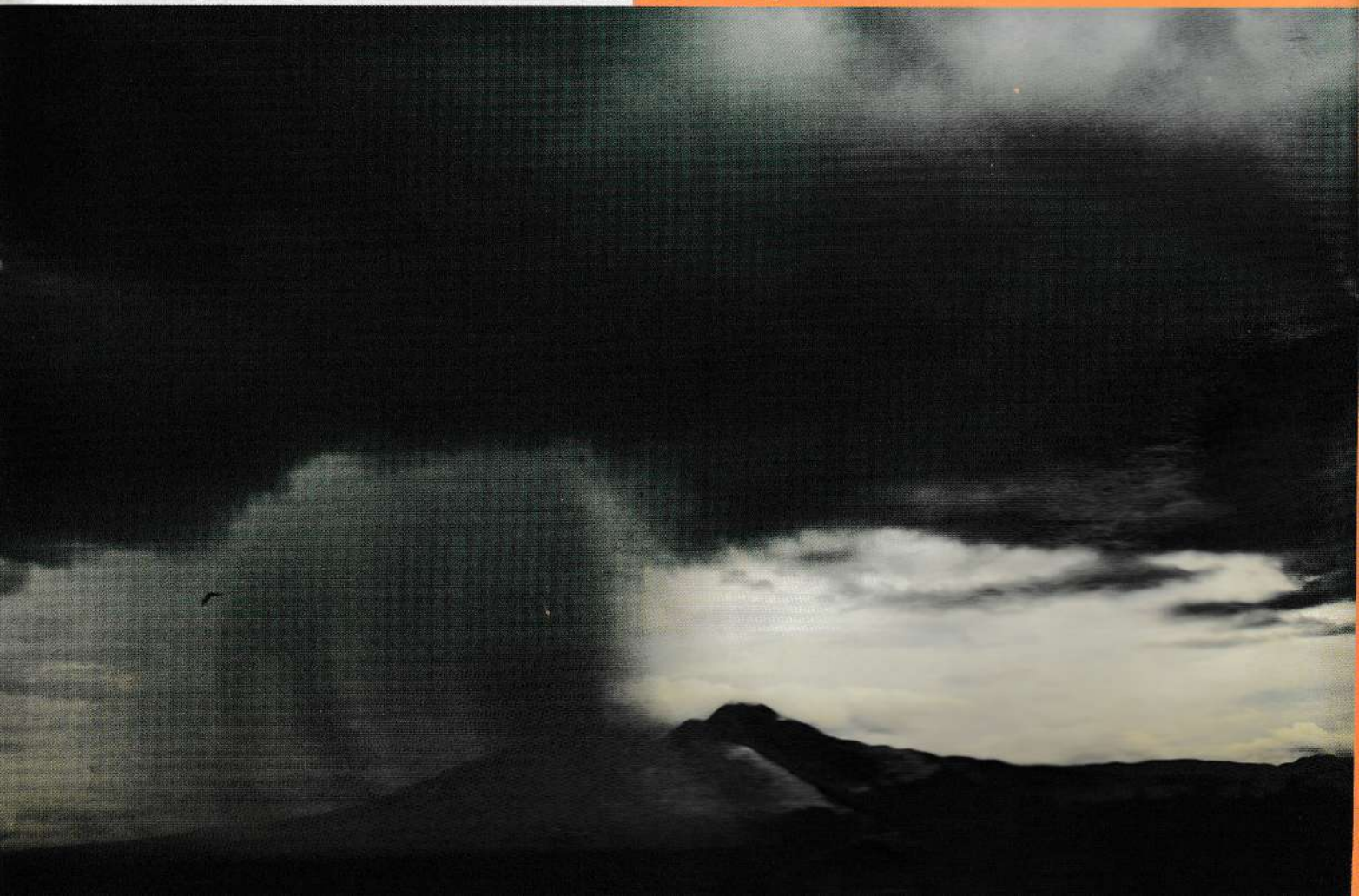
Foto oleh Rudy Novira

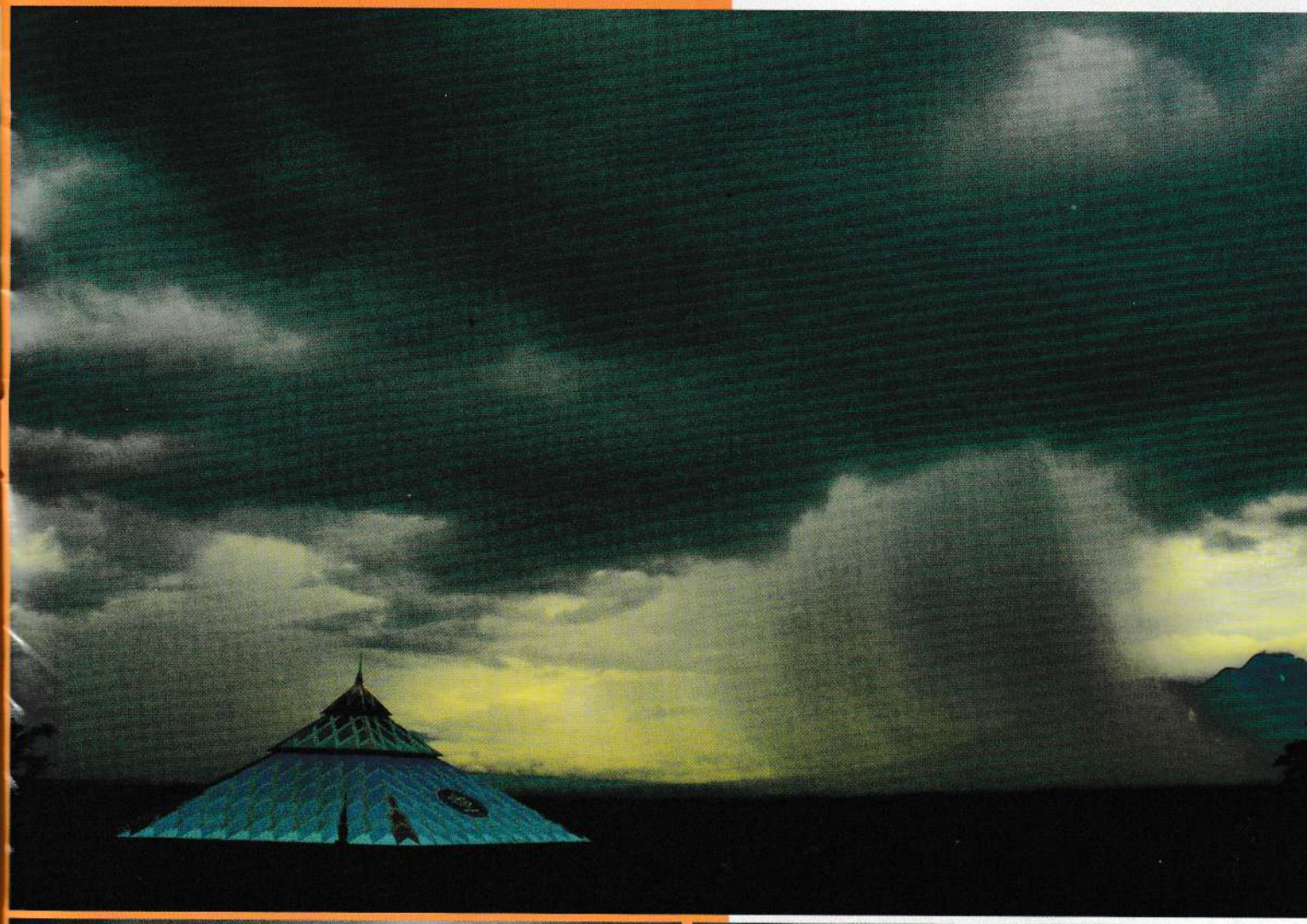


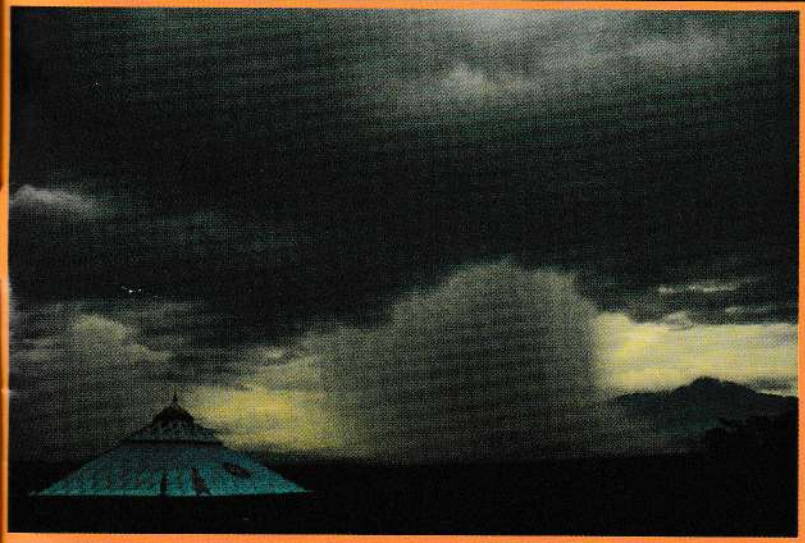
Gunung adalah suatu fenomena menakjubkan yang juga menebarkan misteri serta pesona di bumi ini. Gunung Salak adalah salah satunya. Dikategorikan sebagai gunung berapi. Letaknya bersentuhan dengan kota Bogor. Kekokohannya seolah-olah melindungi kota hujan itu.

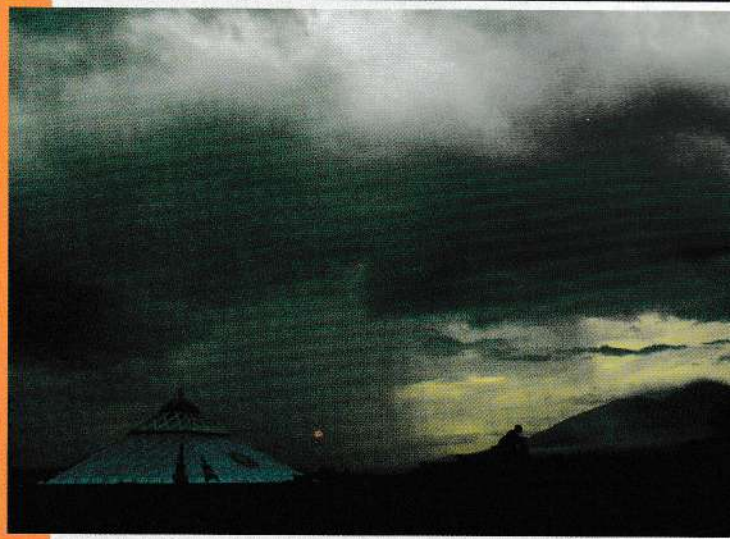
Gunung ini mempunyai beberapa puncak, di antaranya Puncak Salak I dan Salak II. Yang pertama tingginya 2.211 m dan yang kedua 2.180 m dpl. Gunung Salak telah menjadi tempat yang menarik bagi penikmat alam meluangkan waktunya.

Untuk dapat merasakan misteri dan kenikmatan pesonanya dapat pula dengan hanya memandang Gunung Salak dari kejauhan. Ketika suasana mendung dengan payungan awan nan tebal berbagai fenomena alam dapat saja terjadi. Membuat mata tak berkedip memandangnya. Memperkuat aura pesona dan misteri Gunung Salak.









Lokasi Pemotretan:
Kampus IPB Darmaga, Bogor, Jawa barat

Leuen Pukat dan Panglima La'ot

Memperkuat Kembali Sistem Dan Tata Ruang Meula'ot

Penulis : Sanusi M. Syarif
Penerbit : Yayasan Rumpun Bambu Aceh dan CSSP Jakarta

Dalam lembaga adat di Aceh, gelar jabatan pimpinan lembaga adat sangatlah bersahaja dan mencerminkan kekuatan serta kekuasaan.

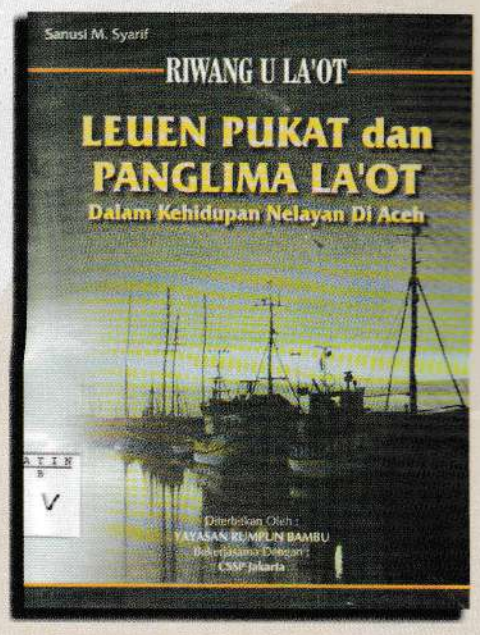
Tersebutlah gelar jabatan seperti *Imeum Mukim,* jabatan adat yang mengatur soal kemasyarakatan ditingkat *mukim* atau imeum Meunasah, gelar jabatan yang memiliki perspektif spiritual dan kepemimpinan.

Untuk lembaga adat yang mengurus sumber-sumber ekonomi, gelar yang paling banyak dipakai adalah *peutua*. Terdapat pula dua gelar untuk pimpinan adat lembaga khusus, yaitu *keujuen blang* untuk memimpin kegiatan yang berkaitan dengan persawahan dan *panglima laot* yang mengatur kehidupan nelayan dan masalah kelautan.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa pada tingkat *gampong*, bila ada kasus yang tidak selesai, para pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke pengadilan adat tingkat *mukim*.

Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa di wilayah adat laot. Dalam wilayah ini sistem penyelesaian sengketa tidak mengenal sistem banding, karena keputusan *panglima laot* biasanya diikuti dan dipatuhi nelayan.

Buku ini bermaksud menelusuri kembali keberadaan wilayah *adat laot* dan sistem kelembagaan yang berkaitan dengan hak adat dan praktek pengelolaan sumber daya kelautan di Aceh, terutama di Krueng Raya, Lampanah, Pasie Tibang, Lamteh Lam Teungoh dan Pulo Aceh. [Sri Nuryani]

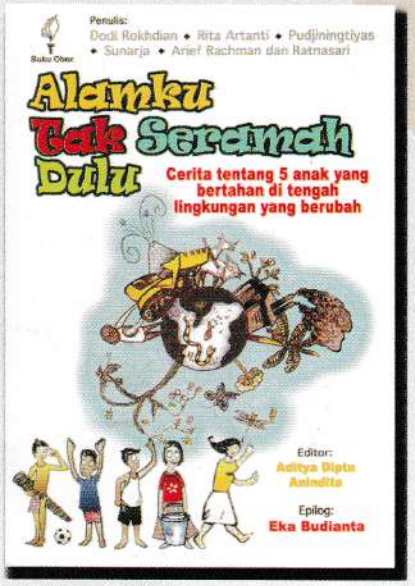


Alamku Tak Seramah Dulu

Globalisasi Yang Manipulatif Dan Melenakan

Penulis : Dodi Rokhdian (et.al)
Penerbit : Yayasan Obor Indonesia

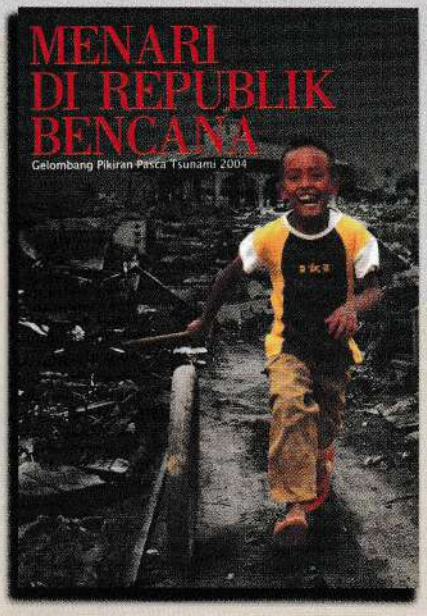
Terkadang kita tidak menyadari perubahan di sekitar kita. Barangkali karena perubahan itu begitu halus mendekat, memanipulasi pikiran dan melenakan, lalu tiba-tiba kita kehilangan segalanya. Uang kemudian menjadi penting ketika manusia mengalihkan kebutuhannya dari alam ke pasar. Uang dan pasar jugalah didukung teknologi informasi dan transportasi yang mempertemukan manusia di berbagai tempat dalam pengalaman yang sama. Konon, para pakar dan pemikir menamakan proses ini sebagai globalisasi.



Globalisasi adalah suatu sistem budaya yang global yang mendunia. Artinya dibelahan dunia mana pun kita berada, pasti akan terkait dalam satu jaringan besar. Kita semua adalah bagian dari mata rantai, dimana kita akan saling mempengaruhi. Tentu ada dua sisi yang dapat kita peroleh dari proses ini, yaitu sisi posistif dan negatif. Kebetulan tokoh-tokoh dalam cerita ini, seperti Pugawar, Sipar, Qodir, Haposan, Fakri dan Bu Suketi termasuk yang tidak beruntung karena alam di sekitar mereka tak lagi ramah dan bersahabat. Buku ini menceritakan bagaimana tokoh-tokoh tersebut mencoba bertahan di tengah perubahan lingkungan tempat hidup mereka. [Sri Nuryani]

Menari Di Republik Bencana :

Gelombang Pikiran Pasca Tsunami 2004



Penulis : Dani Wahyu Munggoro, dkk.
Penerbit : WALHI

Bencana tsunami telah berlalu. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari bencana tersebut. Salah satunya melalui buku ini. Buku dengan judul " Menari Di Republik Bencana : Gelombang Pikiran Pasca Tsunami 2004", merupakan salah satu upaya WALHI melakukan perenungan dan refleksi atas apa yang dilihat, dirasakan, didengar dan dialami selama bergulat dengan kerja-kerja kemanusian di Aceh.

Buku ini mencoba melihat bencana alam yang terjadi di Aceh sebagai bahan belajar yang sangat mahal dan dapat melahirkan gelombang pemikiran yang baru. Buku ini juga dapat menjadi alat baru bagi kita untuk bersiasat dalam menghadapi gempa, gelombang tsunami, tanah longsor, juga gelombang perubahan yang dibawa oleh bencana itu sendiri. Di dalam buku ini kita akan diajarkan bagaimana menari di republik bencana yang bernama Indonesia ini.

Buku ini sangat penting bagi para pengambil kebijakan, anggota perlemen, jurnalis, akademisi, mahasiswa, para penggiat organisasi non pemerintah dan terutama masyarakat luas yang selama ini menjadi korban ketidakpedulian dan kelalaian pemerintah dalam mengelola bencana negeri ini.

[Sri Nuryani]

documentary**collection**

GLIRICIDIA

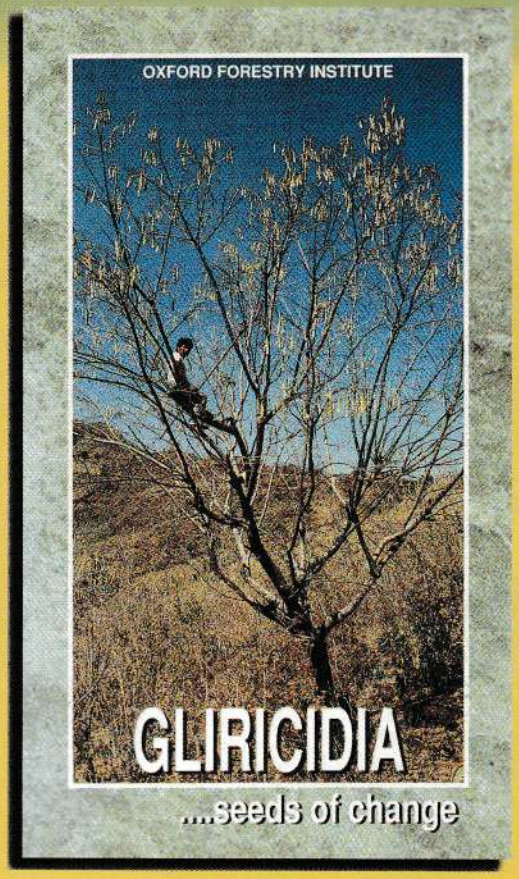
...seeds of change

Film dokumenter pendek berdurasi 17 menit 20 detik, mengetengahkan secara jelas pohon *Glirisidia sepium* sebagai pohon dengan banyak manfaat. Di Indonesia dikenal dengan nama pohon gamal. Pohon ini dapat ditanam luas diseluruh daerah tropis. Tapi tanpa disadari sampai saat ini hanya sedikit dari berbagai variasi genetisnya telah dimanfaatkan.

Film yang diprakarsai oleh *The Forestry Research Programme the Overseas Development Administration* pada tahun 1994, memperlihatkan usaha-usaha meningkatkan keunggulan Glirisidia melalui evaluasi terhadap jenis-jenis baru dan mempelajari reproduksinya secara biologi. Uji coba telah dilakukan di lebih dari 50 negara dengan mengevaluasi daun, produksi kayu bakar yang dihasilkan untuk melihat perbedaan-perbadaan dari berbagai jenis menurut daerah asalnya.

Digambarkan pula bahwa permintaan akan bibit glirisidia unggulan di pasaran dunia jauh di atas persediaan yang ada. Begitu pula permintaan akan bibit berasal dari bunganya yang telah disiapkan di beberapa negara. Sebagai pohon dengan banyak manfaat, diharapkan bibit-bibit ini akan menghasilkan bahan baku yang terbaik dan merubah nasib para petani miskin di alam tropika.

Narrator :
Alun Lewis
Editors :
Andy Matheson dan
David Harwood
Production Coordinator :
Tony Alen
Writter and Producer :
Tony Simons



SBY Deklarasi Perang Terhadap Illegal Logging

Genderang perang terhadap penebang hutan liar kembali ditabuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Masyarakat diminta bersama-sama menjagahutan dan melaporkan jika ada penerbangan dan penggundulan hutan secara liar.

"Kita harus menjaga hutan kita untuk anak cucu. Kalau ada penebangan hutan liar, laporkan kepada polisi. Tembuskan kepada saya," kata SBY saat peresmian PLTA dan Pencanangan penanaman Jarak di Musi Ujan Mas, Kepahiang, Bengkulu, Kamis (19/10/2006).

SBY juga meminta masyarakat Bengkulu tetap menjaga hutan yang masih hijau. Meski diakui ada beberapa yang gundul, hutan tersebut harus segera dihijaukan kembali.

"Saya minta hutan di daerah Bengkulu yang masih bagus ini dijaga. Juga hutan di seluruh Indonesia. Tadi saya lihat sepanjang jalan, ada beberapa yang gundul, segera dihijaukan lagi," tegas SBY.

Menurut SBY, jika hutan terjaga, debit air di sungai dan tanah juga terjaga. Sehingga air tersebut bisa dimanfaatkan sebagai energi yang bermanfaat. Sebaliknya jika hutan tidak terjaga, saat hujan akan terjadi banjir dan longsor. Dan saat kemarau akan kering, sehingga PLTA tidak berfungsi.

Ikut dalam rombongan presiden, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, MenteriPertanian Anton Apriantono, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Dirut PLN Eddie Widiono, Seskab Sudi Silalahi, Juru Bicara Andi Mallarangeng, staf khusus Yenny Zannuba Wahid, dan staf khusus Heru Lelono.

Dalam sambutannya SBY juga menyatakan dalam waktu dekat akan segera dibangun PLTA Renon dan Sahan I di Sumatera utara. Masing-masing berkapasitas 82 MW dan 180 MW. Pemerintah juga sedang mencari investor untuk pengembangan listrik batubara di Jawadengan kekuatan 10 ribu MW.

Pemerintah juga menganggarkan dana Rp 648 miliar untuk pengembangan listrik di 28 desa. Pengembangan listrik, kata SBY menjadi prioritas saat ini. Sebab, kebutuhan listrik di Indonesia terus meningkat. Padahal kemampuan PLN dalam menyediakan listrik bagi masyarakat masih sangat terbatas.

Saat ini PLN baru memiliki kapasitas 25 ribu MW. Kebutuhan listrik di Indonesia, lebih dua kali lipat lebih besar darai kapasitas yang ada saat ini. SBY juga mengajak masyarakat di Bengkulu dan di seluruh tanah air untuk menanam jarak. Menurut SBY, saat ini diperlukan energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar dari fosil. "Potensi Bengkulu sangat bagus untuk jarak," tandasnya. (Yid/ary)

Sumber: Detik Com, 20 Oktober 2006
Muhammad Nur Hayid - detikcom

Lomba Lukis Internasional

Dalam rangka kegiatan tahunan "The 16 th International Children's Painting Competition on the Environment", UNEP bekerjasama dengan Japan-Based Foundation for Global Peace and Environment (FGPE), Bayer and Nikon Coorporation mengadakan lomba lukis yang diperuntukan bagi anak-anak seluruh dunia yang berusia 6 -14 tahun. Tema dari Lukisan tersebut adalah "Perubahan Iklim" .

Lukisan diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2006 kepada :

Attn. Tanawan Sarabuddhi
United Nations Environment Programme
Regional Office for Asia and the Pacific
2 nd Floor, United Nations Building
Rajdamnren Nok Avenue, Bangkok 10200, THAILAND
Phone/Fax : (662) 288-2314 / 280-3829
Email : mailto:sarabuddhi@uu.org

Informasi lebih rinci mengenai lomba lukis ini dapat diperoleh dengan meng-klik:

The 16 th International Children's Painting Competition on the Environment
(http://www.menlh.go.id/acil/competition/unep%20program.pdf)

Atau

The International Children's Painting Competition on the Environment
(Http://www.unep.org/Tunza/Children/Competitions/competitions.asp). **[AA]**

Ocean Week II

Ocean Week II kali ini lebih fokus untuk mengadakan acara yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan, dari pelajar hingga masyarakat umum, kegiatan akan dimulai pada 10 Desember 2006 hingga 10 Februari 2007 di Pantai Kenjeran, Surabaya Jawa Timur.

Tema kali ini yaitu **Meretas Tradisi Membangun Bahari Nusantara**, tujuannya ingin memperkenalkan pengetahuan bahari sejak usia dini lewat acara-acara yang ada di Ocean Week II. Acara yang diadakan oleh Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini bertujuan menanamkan jiwa bahari bagi masyarakat Indonesia

Acara yang akan dilakukan bersifat keilmuan berskala nasional, seperti seminar kewirausahaan, pelatihan GPS dan *fishfinder*, dialog interaktif, training manajemen bencana laut, *mangrove expo*, dan Bakti Bahari Nusantara. Selain itu juga terdapat kegiatan rekreatif yang diperuntukkan siswa TK dan SD yaitu lomba mewarnai dan menggambar. Juga diadakan satu kegiatan sosial berupa pengobatan gratis.

Informasi lengkap bisa untuk memilih dengan mengunjungi situs ITS di

www.its.ac.id

[AA]

Social and Conservation Entrepreneurship Education

www.latin.or.id

The Indonesian Tropical Institute



Where to Get FOREST CULTURE?

Pick Up Point >>>

Café Telapak, Gedung Alumni IPB, Jl. Raya Pajajaran No 54 Bogor

Hotel Salak, Jl. Ir.H. Juanda No. 8 Bogor

Pasadena, Jl. Pajajaran no. 7 Bogor

Kafe Mangiare, Jl. Pakuan No. 21 Bogor

The Coffe Pot, Jl. Salak, Bogor

MMA IPB, Gedung MMA IPB Jl. Raya Pajajaran Bogor

Darmint Café, Pasar Festival blk GF-8 Kuningan. Jl. HR Rasuna Said kav. 22C , Jakarta

Kampung Wisata Cinangneng Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea Bogor

LATIN, Jl. Sutera No. 1 Desa Situgede, Bogor Barat

Info pick up point, sirkulasi, iklan, dan marketing FOREST CULTURE >> 0251 420522-23 Fax. 0251 626593
Email >> sirkulasi_fc@latin.or.id (sirkulasi) - marketing_fc@latin.or.id (marketing/iklan)

Anda tertarik dengan isi FOREST CULTURE? Punya pendapat, saran, atau kritik tentang FOREST CULTURE?
Bergabunglah di e-mail group FOREST CULTURE >> forestculture@googlegroups.com



Supported By :

LATIN - Lembaga Alam Tropika Indonesia

VSO

IDRC International Development Research Centre

CRDI Centre de recherches pour le developpement international

European Union

mfp MULTISTAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME

ISSN 1907-8137